

RINGKASAN

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak daerah yang digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persentase penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas selama 5 tahun terakhir menempati urutan terakhir bila dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya yang termasuk dalam eks karesidenan Banyumas. Hal tersebut, menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Banyumas. penelitian ini menggunakan teori atribusi dan teori kepatuhan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Banyumas. Jumlah responden ditentukan menggunakan rumus slovin dan penentuan responden menggunakan metode *Convenience Sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, (3) sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, (4) penghasilan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, (5) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Implikasi dari penelitian ini adalah wajib pajak harus lebih memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perubahan peraturan maupun sistem yang berkaitan dengan PBB-P2. Sedangkan untuk pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang optimal dan menentukan strategi tepat sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 dapat meningkat.

Kata kunci: PBB-P2, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus.

SUMMARY

Rural and urban land and building tax (PBB-P2) is a type of regional tax used to finance the Regional Budget (APBD). The percentage of UN-P2 revenue of Banyumas Regency over the last 5 years ranks last when compared to 4 other districts included in the former Banyumas karesidenan. This shows that the level of compliance of PBB-P2 taxpayers in Banyumas Regency is lower than other districts.

The purpose of this study was to examine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer income and quality of fiscal services on PBB-P2 taxpayer compliance in Banyumas Regency. This study used attribution theory and compliance theory. The population in this study is PBB-P2 taxpayers in Banyumas Regency. The number of respondents is determined using the slovin formula and the determination of respondents using the Convenience Sampling method.

The results of this study show that: (1) taxpayer knowledge has a significant positive effect on PBB-P2 taxpayer compliance, (2) taxpayer awareness has a significant positive effect on PBB-P2 taxpayer compliance, (3) tax sanctions have a significant positive effect on PBB-P2 taxpayer compliance, (4) taxpayer income has a significant negative effect on PBB-P2 taxpayer compliance, (5) the quality of fiscal services has a significant positive effect on compliance taxpayer PBB-P2.

The implication of this study is that taxpayers must better understand and follow the development of information and changes in regulations and systems related to PBB-P2. Meanwhile, the government is expected to provide optimal services and determine the right strategy so that the level of compliance of taxpayers paying PBB-P2 can increase.

Keywords: PBB-P2, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer income, quality of fiscal service